



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
KAMPAR

BANGKINANG KOTA

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim
Assalamu'alakum Wr. Wb.*

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen perencanaan yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar selama tahun 2023-2026.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan rencana strategis Tahun 2017-2022 ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KABUPATEN KAMPAR


A F D A L, ST., MT
NIP. 19700325/199903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	28
3.2 Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026	28
3.3 Telaahan Renstra Dinas PUPR	32

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	80

BAB I PENDAHULUAN

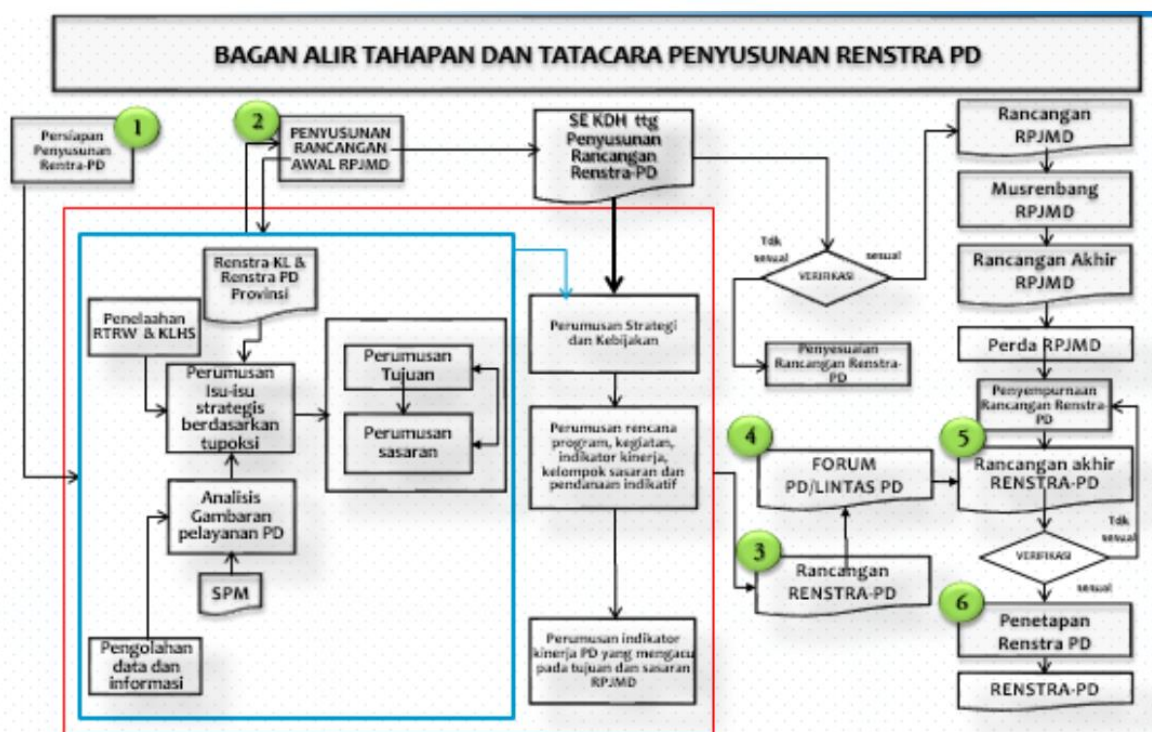
1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2012, dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis, juga semakin menuntut peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar untuk melaksanakan salah satu urusan wajib maupun pilihan Pemerintah Kabupaten Kampar secara lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab, dan semakin mempertegas perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi dengan unit organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka melaksanakan urusan wajib maupun pilihan pemerintah daerah.

Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pembangunan Kabupaten Kampar sesuai dengan RPJM Kabupaten Kampar 2017-2022.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Rujukan hukum yang melandasi penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar 2017–2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai landasan ideologis,
2. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,
3. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan keseragaman pembangunan,

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
7. Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan kewenangan daerah,
8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah,
9. Undang-Undang No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah,
13. Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai landasan acuan pengukuran indikator kinerja,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah,
17. Peraturan Daerah No 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025,
18. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar ini adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar merupakan salah satu pendukung terhadap pencapaian visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Kampar.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar berupa program-program dan kegiatan-kegiatan tahunan yang bersifat strategis yang akan dibiayai khususnya dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, APBD Provinsi, APBN dan lainnya selama kurun waktu 2023-2026. Strategis di sini mengandung maksud bahwa program dan kegiatan tersebut mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai Program.

Selain itu, Rencana Strategis ini juga merupakan acuan utama bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perumusan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar yang menghasilkan uraian Program - kegiatan disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra OPD, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Dinas dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan OPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan RPJMD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar memiliki fungsi berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang, operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan.
- b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pemanfaatan ruang, operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan.
- c. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat .
- d. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan Ruang, jalan dan jembatan, sumber daya air, dan keciptakaryaan.
- e. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa konstruksi kepada masyarakat penyedia jasa konstruksi.
- f. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan tata ruang.
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi setiap bagian dan sub dinas sebagai berikut:

Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum, penyusunan program dan pelaporan, kepegawaian dan keuangan dinas.

Bidang Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Kepala Dinas dalam Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bidang Sumber daya Air

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Kepala Dinas dalam bidang pengairan/irigasi dan rawa, pengembangan sumber daya air dan pengendalian banjir.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Ruang dan Pertanahan.

Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun pedoman, pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

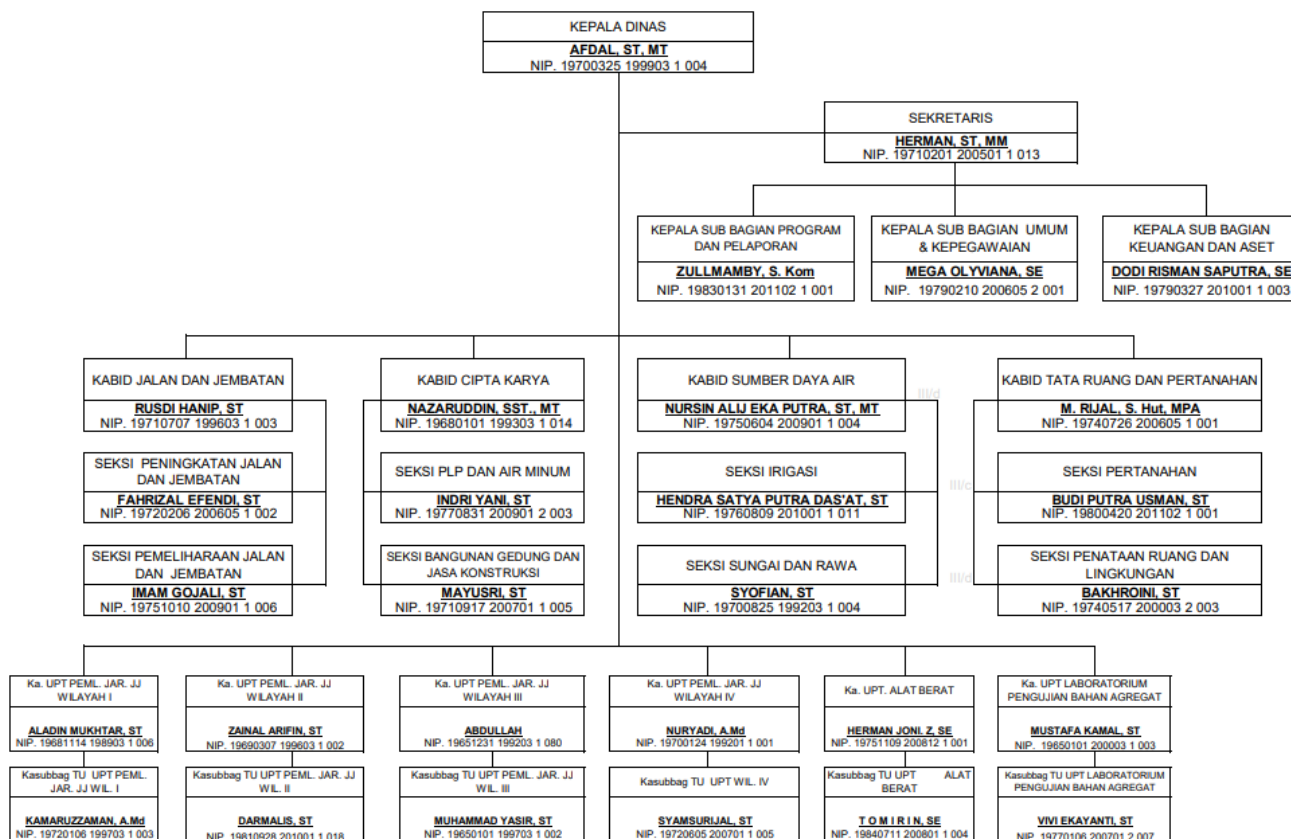
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian secara umum terhadap seluruh peralatan/alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi administrasi umum, perbengkelan, pengoperasian dan pergudangan.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Laboratorium mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan laboratorium meliputi administrasi, pengujian material dan pengujian lapangan.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Wilayah I s/d IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Wilayah tugas masing –masing.

Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Bidang Sumber Daya Air:
 - 1) Seksi Sungai dan Rawa;
 - 2) Seksi Irigasi;
5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan , terdiri dari:
 - 1) Seksi Pertanahan ;
 - 2) Seksi Penataaan Ruang dan Lingkungan ;
6. Bidang Cipta Karya , terdiri dari:
 - 1) Seksi PLP dan Air Minum ;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi ;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - 1) UPT Wilayah I, II, III, IV,
 - 2) UPT Alat Berat
 - 3) UPT Laboratorium

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

a. Kepegawaian

Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar pada Januari 2022 tercatat sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari:

- ☞ Golongan IV : 3 orang
- ☞ Golongan III : 98 orang
- ☞ Golongan II : 49 orang
- ☞

Ditinjau dari formasi dan pengisian jabatan struktural, kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Formasi Jabatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II/b	1 orang	
2.	Sekretariat	III/a	1 orang	
3.	Kepala Bidang	III/b	4 orang	
4.	Kepala Seksi	IV/a	8 orang	
5.	Kasubag	IV/a	3 orang	
6.	Ka. UPTD	IV/a	5 orang	
7.	Kasubbag. TU UPTD	IV/b	6 orang	

Ditinjau dari segi pendidikan formal, kondisi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Komposisi Pegawai Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah						
			S2	S1	D-III	SLTA	SLTP	SD
1.	IV	3 orang	1	2	-	-	-	-
2.	III	99 orang	1	54	12	34	-	-
3.	II	48 orang	-	-	1	42	1	4
	Jumlah	152 orang	2	56	13	76	1	4

Selain jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar juga memiliki tenaga honorer sebanyak 11 (sebelas) orang.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar menempati gedung kantor yang terletak di Jalan HR. Soebrantas Bangkinang yang telah dibangun sejak tahun Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih rinci per posisi Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Sarana dan Prasarana Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Kondisi
1.	Bangunan Tempat Kerja	Unit	1	Baik
2.	Kendaraan Roda Empat	Unit	11	Baik
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit	9	Baik
4.	Komputer	Unit	22	Baik
5.	Printer	Unit	10	Baik
6.	Alat Telekomunikasi	Unit	-	-
7.	Rumah Dinas/Jabatan	Unit	-	-
8.	Gedung Balai Latihan	Unit	-	-
9.	Gedung Work Shop	Unit	1	Baik
10.	Laboratorium	Unit	1	Baik
11.	Alat-alat Berat	Unit	16	Baik
12.	Perlengkapan dan peralatan bengkel alat-alat berat	Unit	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, umumnya **cukup memadai** dari segi

kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini terutama tercermin dari kondisi yang dirasakan **sudah dapat** menciptakan suasana kerja yang nyaman.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar harus dapat menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, Potensi dan permasalahan pelayanan OPD; dan Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan OPD.

Hasil dari langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

NO	Sasaran Renstra	Indikator Capaian	Target Capaian Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Proporsi Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	72,36	74,77	57,86	58,63	0,80	0,78
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	84,56	89,94	46,75	47,12	0,55	0,52
		Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,86	51,80	69,9	70,33	1,37	1,36

Tabel 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR s/d Tahun 2021

NO	Indikator Capaian	Anggaran Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Proporsi Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	140.681.428.801	121.586.091.770	124.595.864.446	99.261.579.031	0,89	0,81
	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	2.341.172.916	3.922.997.799	1.772.485.450	3.444.838.799	0,75	0,88
	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	3.377.801.052	2.570.536.752	69,9	5.529.714.413	0,76	0,92

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Secara umum beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pembangunan bidang pekerjaan umum, pada saat ini dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) permasalahan/tantangan sebagai berikut:

a. Tantangan pada kelembagaan dan ketatalaksanaan

Aparatur pemerintah merupakan sumber daya yang potensial dan sebagai faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan berbagai pengembangan, penertiban dan pengaturan serta penataan yang diikuti dengan pembinaan, pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu melayani masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Beberapa isu strategis yang terjadi dalam bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ini lain:

- ☞ Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur guna mewujudkan PNS yang profesional;
- ☞ SDM aparatur pengelola kegiatan masih terbatas;
- ☞ Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat, berimplikasi kurangnya motivasi dan disiplin kerja aparatur. Sementara di sisi lain aparatur pemerintah dituntut menjadi pelayan dan pengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Tantangan pada Bidang Jalan dan Jembatan

Kegiatan pembangunan dalam bidang jalan dan jembatan yaitu dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi jalan dan jembatan sebagai jalur perhubungan antar desa dan kota baik dalam kecamatan, kabupaten maupun dengan

kabupaten/kota lainnya. Beberapa isu strategis dalam bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kampar antara lain:

- Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang ada.
- Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, seperti bahu jalan dan saluran tepi jalan
- Masih adanya wilayah yang belum mempunyai aksesibilitas jalan yang seimbang.
- Pengawasan Ruang Milik Jalan.
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana jalan

c. Tantangan Bidang Sumber Daya Air

Kegiatan pembangunan sumber daya air ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan air bagi masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri. Beberapa isu strategis berkaitan dengan bidang Sumber daya air di Kabupaten Kampar antara lain:

- ☞ Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air yang dapat dijadikan andalan untuk sumber air baku, sementara di sisi lainnya kebutuhan terhadap air baku semakin meningkat;
- ☞ Terjadinya perusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan yang dapat mengakibatkan banjir;
- ☞ Kerusakan pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air yang mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.
- ☞ Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi.

d. Tantangan Bidang Tata Ruang

Dalam menjalankan tugas bidang tata ruang, ada beberapa tantangan antara lain :

- ☞ Belum tersedianya regulasi detil tentang tata ruang;
- ☞ Belum tersedianya rencana tata ruang;
- ☞ Belum terbentuknya Kerjasama antar institusi pemerintah dan swasta;
- ☞ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- ☞ Masih kurangnya data dan informasi ruang;

e. Tantangan Bidang Keciptakarya

Dalam menjalankan tugas keciptakarya, ada beberapa tantangan antara lain :

- ☞ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang;
- ☞ Belum terkoneksi sistem drainase kota;
- ☞ Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang yang belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan daya dukung lingkungan;
- ☞ Masih terbatasnya sumber daya pemerintah daerah (sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan infrastruktur) untuk memelihara drainase kota sehingga bisa berfungsi maksimal ketika banjir datang;
- ☞ Keterbatasan sumber daya pengelolaan air bersih;
- ☞ Banyaknya bangunan pemerintah yang tidak layak fungsi;
- ☞ Terbatasnya kualitas SDM penyedia jasa konstruksi;

Secara umum pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka sebesar-besar kesejahteraan rakyat dengan mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Secara garis besar dapat ditegaskan bahwa pembangunan bidang pekerjaan umum, dan pengairan di Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 2017-2022 yang menjadi fokus perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar diarahkan untuk menciptakan kondisi/peleluang sebagai berikut:

a. Peluang pada Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pembangunan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan diutamakan agar tercipta sumber daya aparatur yang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini dilaksanakan melalui:

- ☞ Peningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan;
- ☞ Peningkatkan sarana dan prasarana kerja serta kesejahteraan aparatur;

- ☞ penataan kelembagaan pemerintahan daerah yang dinamis sesuai kewenangan yang diemban.

b. Peluang pada Pekerjaan Umum

Pembangunan bidang pekerjaan umum diarahkan agar tercukupinya penyediaan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan sebagai jalur perhubungan antar desa dan kota baik dalam kecamatan, kabupaten maupun dengan kabupaten/kota lainnya. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk kemajuan daerah yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia guna peningkatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kampar.

c. Peluang pada Pengairan

Pembangunan bidang pengairan diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan pasokan air bagi masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga, pemukiman, pertanian, dan industri. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu dilakukan melalui:

- ☞ Perlunya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air dapat dipertahankan;
- ☞ Peningkatan kapasitas aliran sungai dan berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir dalam mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana banjir dan kekeringan;
- ☞ Meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi;
- ☞ Optimalnya fungsi jaringan irigasi dan rawa sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi terutama untuk mendukung kawasan pertanian;
- ☞ Peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.**

Dalam mengwujudkan pembangunan Infrastruktur secara sistematis dan komprehensif guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa identifikasi permasalahan dalam penanganan bidang infrastruktur antara lain :

No	Pokok Permasalahan	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
Bidang Jalan dan Jembatan			
1.	Indeks aksesibilitas rata-rata tingkat masih rendah yaitu 0,49	1.1 Kondisi jalan dalam keadaan mantap baru mencapai 59,64 % dan masih terdapat 40,36 % jalan provinsi dengan kondisi kerusakan ringan sampai rusak berat pada tahun 2018	1.1.1 Pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala tidak dilakukan pada seluruh ruas karena keterbatasan anggaran.
Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan			
2.	Masih belum terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Pertanahan dengan baik	2.1 Belum tertatanya Layanan Pertanahan	2.1.1 Belum disusunnya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Pemerintah Daerah
			2.1.2 Masalah Tumpang tindihnya kepemilikan lahan
		2.2 Belum tersedianya data base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai	2.2.1 Belum teridentifikasinya subyek dan obyek redistribusi tanah.
			2.2.2 Belum terinventarisirnya tanah adat/tanah ulayat

		2.3 Belum Maksimalnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	2.3.1 Ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW
Bidang Cipta Karya			
3.	Terbatasnya akses air bersih yang berasal dari leding/perpipaan	3.1 SPAM permukiman belum dapat memenuhi kebutuhan air minum karena kapasitas produksi yang rendah.	

3.2 Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, dan program sesuai arah kebijakan pembangunan kabupaten Kampar 2023-2026.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar 2017-2022

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera					
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor		
	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar		Penghambat	Pendorong	
-1	-2	-3	-4	-5	
1	Misi 5 : Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan				
	Sasaran :				
	Perencanaan Tata Ruang	1.	Belum Tersedianya Regulasi Dan Data Tata Ruang Yang Memadai Guna Pelaksanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Dalam Rangka Menunjang Dan Mengakomodir Investasi Di Kabupaten Kampar	1.	Belum Tersedianya Regulasi Detail Tata Ruang
	Pemanfaatan Ruang	2.	Belum Memadainya Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pengadaan Tanah Yang Di Sebabkan Terbatasnya Regulasi, Sosialisasi, Seminar, Workshop Dan Bimbingan Teknis Terkait Pengadaan Tanah Terutama Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Kepentingan Umum.	2.	Belum Terbentuknya Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Dan Swasta

	3.	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	
	4.	Belum Tersedianya Data Dan Informasi Terkait Tata Ruang Wilayah	
	5.	Masih Terbatasnya Regulasi Pengadaan Tanah Khususnya Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Kepentingan Umum.	
	6.	Terbatasnya Forum-Forum Diskusi, Seminar, Workshop Terkait Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Sehingga Sulit Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dibidang Pengadaan Tanah.	

3.3 Telaahan Renstra Dinas PUPR

Adapun isu-isu aktual pada bidang infrastruktur antara lain :

1. PERWUJUDUAN SISTEM JARINGAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4)

- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4):
 - Jalan Km. 2 Kuok – Kp. Godang
 - Jalan Kp. Godang – Pulau Lawas
 - Jalan Lubuk Agung – Balung
 - Jalan Pulau Lawas – Pematang Kulim
 - Jalan Bangkinang – Lipat Kain
- Pembangunan Pembukaan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
 - Jalan Simpang Sungai Jernih – Simpang Poro.

2. PERWUJUDAN SISTEM JALAN LOKAL PRIMER (JKP)

- Peningkatan dan Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan Lokal Primer (JKP).
 - Jalan Buluh Nipis – Rakit Penyeberangan
 - Jalan Bonca Kelubi-Kebun Akasia
 - Jalan Danau Bingkuang-Empang Poteh
 - Jalan Danau Lancang - Tebing Lestari
 - Jalan Deli Makmur - Air Terbit
 - Jalan Desa Baru – Pangkalan Baru
 - Jalan Gunung Sahilan - Gunung Sari
 - Jalan Gunung Sari - Batas Kuansing
 - Jalan Kebun Durian – Gunung Sahilan
 - Jalan Kijang Makmur - Tebing Lestari
 - Jalan Kinantan - Muara Mahat Baru
 - Jalan Km. 18 Sei.Putih - Air Terbit
 - Jalan Kota Bangun - Kijang Makmur
 - Jalan Lbk. Sakat – Teluk Petai
 - Jalan Lipat Kain – Kuntu
 - Jalan Muara Mahat Baru - Sibuk II
 - Jalan Pangkalan Baru – Buluh Nipis
 - Jalan Pasar Minggu – Bonca Kelubi

- Jalan Pasar Plamboyan (Sumber Makmur) – Kijang Rejo
- Jalan Penghidupan - Bina Baru
- Jalan Sei. Bungo – Gading Permai
- Jalan Sei. Pagar – Mentulik
- Jalan Sei. Pinang - Simpang Sei Galuh
- Jalan Sei. Putih – Sibuk II
- Jalan Simpang Membot - Kota Bangun
- Jalan Simpang Sei Galuh- Deli Makmur
- Jalan Senama Nenek - Sp. Parabola
- Jalan Sp. Petai - Maja Pahit (Sari Galuh)
- Jalan Sp. Sei. Lindai – Ktr Camat Tapung Hulu
- Jalan Suka Menanti - Koto Damai
- Jalan Sumber Sari (Pt.Sam) – Danau Lancang
- Jalan Tanjung Mengkudu - Dusun I Kualu (SimpangTugu)
- Jalan Teratak Buluh - Desa Kualu
- Jalan Km. 21 Rimbo Panjang – Parit Baru
- Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu
- Jalan Bangun Sari – Gading Permai
- Jalan Bina Baru (Sp.Tugu) - Koto Damai
- Jalan Bina Baru (Sp. Tugu) - Mekar Jaya
- Jalan Lubuk Sakai (SpTugu) – Utama Karya
- Jalan Mayang Pongkai - Lubuk Sakai (Sp. Tugu)
- Jalan Mekar Jaya – Sialang Kubang
- Jalan Mentulik – Bangun Sari
- Jalan Poro II – Danau Bokuok
- Jalan Kepau Jaya – Sei. Bungo
- Jalan Km. 28 Sei. Pagar – Sialang Kubang
- Jalan Sei. Silam – Ranah Sungkai
- Jalan Sp. Petai – Rakit Pulau Payung
- Jalan Sp. Sei. Galuh – Bukit Karotai
- Jalan Simp. Pasar Mentulik – Sei. Kampar
- Jalan Lubuk Sakat – Teluk Petai

3. PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLingp)
 - Seluruh Ruas Jalan Kabupaten Selain JKP-4 dan JLP
4. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 - Normalisasi Sungai yang mengalami Abrasi dan Sedimentasi.
 - Pembangunan dan Perbaikan Sistem Irigasi
5. PERWUJUDAN RENCANA SISTEM PUSAT-PUSAT PERKOTAAN
 - Penyempurnaan RDTR Kawasan Perkotaan
 - Perencanaan Teknis Kawasan Prioritas Perkotaan
 - Pembangunan Kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu
 - Penyusunan Masterplan dan Peningkatan Pelayanan Air Minum
 - Pembangunan Sistem Drainase Kota
6. PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 - Pembangunan Sarana Penunjang Jalur Interpretasi
 - Pembangunan Jalan Lingkar Perbatasan
 - Pembangunan IPAL Terpadu

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengairan Kabupaten Kampar 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPJP Kabupaten Kampar Tahun 2007-2027 dan RKP Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar secara serasi, selaras dan berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Struktur Ruang Kabupaten Kampar

Wilayah Kabupaten Kampar saat ini memiliki luas kurang lebih 11.289,28 Km² atau 11,94 % dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km²), yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

Ditinjau dari sudut pemanfaatan lahan pada tahun 2022, dari luas wilayah Kabupaten Kampar 11.289,28 Km² tersebut terbagi atas:

Tabel III.3
Luas Tanah Menurut Penggunaannya
Tahun 2022 (dalam Ha)

No.	Penggunaan Lahan	2022
1.	Tanah sawah	5.507
2.	Pekarangan, bangunan dan lahan sekitarnya	352,022
3.	Tegal kebun	71.784
4.	Ladang huma	53.973
5.	Padang rumput	5.678
6.	Rawa tidak ditanami	-
7.	Kolam	-
8.	Sementara tidak diusahakan	34.163
9.	Hutan	173.194
10.	Perkebunan	370.447
11.	Lain-lain	62.16
	Jumlah	11.289,28

Sumber: "Kampar Dalam Angka" oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar.

Perhubungan darat merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat dan ini sangat menunjang perekonomian daerah terutama daerah perkebunan dan daerah sentra ekonomi lainnya. Jaringan transportasi jalan di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 memiliki jalan sepanjang kurang lebih 2.473,21 Km yang dapat diklasifikasikan perkembangannya menurut jenis permukaan jalan dari tahun 2019 sd tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.4
Panjang Jalan di Kabupaten Kampar Menurut Jenis Permukaan Jalan
Tahun 2019 - 2021

Uraian	2019 (Km)	2020 (Km)	2021 (Km)
Jalan Aspal	1218,44	1297,37	1392,44
Jalan Kerikil	856,72	880,18	949,28
Jalan Tanah	253,27	254,37	254,37

Jumlah	2328,43	2431,92	2473,21
---------------	----------------	----------------	----------------

Kondisi jalan di Kabupaten Kampar hingga tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1.198,78 Km dalam kondisi baik, 335,92 Km dalam kondisi sedang, 293,91 Km dalam kondisi rusak dan sepanjang 199,74 Km dalam kondisi rusak berat. Adapun rincian lebih lanjut perkembangan panjang dan kondisi jalan sebagaimana disajikan pada Tabel III.5 berikut:

Tabel III.5
Kondisi Jalan di kabupaten Kampar Menurut Jenis Permukaan jalan
Tahun 2019 s.d. 2021

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
2019	2328,43	1705,30	241,83	248,19	133,11
2020	2431,92	1775,30	291,83	243,19	121,59
2021	2473,21	1795,30	251,83	295,97	130,11

3.4.2 Ruang Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kampar

1. Potensi Pengembangan Perikanan

Kabupaten Kampar saat ini telah menjadi pusat perikanan air tawar di Provinsi Riau. Dengan luasan lahan perikanan yang cukup besar, pengembangan perikanan darat masih menjadi perhatian dalam rencana pembangunan ke depan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi lahan perikanan dengan mendorong peningkatan produksi yang disertai pembinaan benih, pakan dan pemasaran. Selain itu sektor perikanan air tawar masih dapat dikembangkan dengan mendorong nilai tambah melalui produksi pengolahan dan integrasi dengan pariwisata.

2. Potensi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan

Sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan masih merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan mengingat luasan kawasan perkebunan baik karet maupun sawit yang begitu besar diantara daerah lain di Provinsi Riau. Komoditas lain meliputi kelapa, gambir, kakao, kopi dan pinang, serta jeruk kuok juga masih menjadi potensi dalam pengembangan perkebunan rakyat. Ketidakjelasan status lahan perkebunan masih menjadi kendala yang masih terjadi, di sisi lain pemanfaatan lahan untuk aktifitas perkebunan rakyat selain berkontribusi pada peningkatan produksi perkebunan, juga dapat menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Perhatian terhadap ketersediaan lahan perkebunan rakyat, pendampingan dan pembinaan menjadi hal

yang penting dalam perencanaan ke depan. Integrasi lahan-lahan perkebunan perusahaan dengan peternakan sapi juga menjadi peluang yang dikembangkan.

3. Potensi pengembangan pariwisata daerah

Sektor pariwisata merupakan salah sektor yang memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Kampar memiliki banyak potensi wisata mulai dari wisata alam meliputi objek sungai, taman nasional, air terjun dan lainnya; Wisata Budaya meliputi objek situs dan candi; Wisata Kuliner dengan menyediakan makanan khas yang perlahan menjadi incaran warga Pekanbaru; dan Wisata Kreatif dengan memadukan sentra perikanan berikut produk-produk olahannya sehingga menjadi destinasi wisata baru.

Selama ini Kabupaten Kampar menjadi daerah perlintasan yang hanya dilalui para wisatawan yang menuju Sumatera Barat. Mobilisasi wisatawan yang hanya melalui Kabupaten Kampar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pendapatan baru melalui sektor pariwisata. Mengingat juga posisi strategis Kabupaten Kampar yang berada dalam kawasan regional Pekan Sikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). Pengembangan destinasi wisata dapat menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan bukan merupakan sebuah perlintasan. Beberapa daerah pariwisata unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain:

Tabel III.6. Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Kampar

No.	Nama Objek Daerah Tujuan Wisata	Kecamatan
1	Taman Rekreasi Sekijang	-
2	Taman Mini Kembang Sungkai	Bangkinang Kota
3	Bukit Candika	Bangkinang Kota
4	Stanum	Bangkinang Kota
5	Rumah Adat Lontiok	Kuok
6	Jembatan Berayun	Kuok
7	Lobang Kelam	Kuok
8	Desa Wisata Pulau Belimbing	Kuok
9	Museum Kandul Kemilau Emas	Kuok
10	Bukit Na'ang	Bangkinang
11	Kebun Binatang Kasang Kulim	Siak Hulu

13	Kerajaan Gunung Sahilan	Gunung Sahilan
14	Balimau Kasai	Kampar
15	Mesjid Ikhsan	Kampar
16	Rumah Adat Suku Bendan	Kampar
17	Bendungan S. Tibun	Kampar
18	Bendungan Kampar	Kampar
19	Mesjid Jami	Kampar
20	Makam Datuk Alif & Wahid	Kampar
21	Makam Cina	Kampar
21	Benteng Tanah Nagaro	Kampar
22	Masjid Kubro	Kampar
23	Danau Harapan	Kampar
24	Bendungan Sungai Paku	Kampar Kiri
25	Tugu Khatulistiwa/Equator	Kampar Kiri
26	Air Terjun 7 tingkat	kampar Kiri Hulu
27	Makam Syech Burhanudin	Kampar Kiri Hulu
28	Masjid Balah	Rumbia Jaya
29	Danau Lancang	Rumbio Jaya
30	Danau Bekas Tambang	Salo
31	Desa Wisata Buluh Cina	Siak Hulu
32	Danau Bakuok	Tambang
33	Kuburan Cina	Tapung Hilir
34	Pusaka Adat	Tapung Hilir
35	Kuburan Cina (keramat)	Tapung Hilir
36	Budaya Desa Sekijang	Tapung Hilir
37	Wisata Alam Sekijang	Tapung Hilir

38	Budaya Desa Sekijang	Tapung Hilir
39	Air Panas	Tapung Hulu
40	Perumtel PLTA	XIII Koto Kampar
41	Puncak Panorama	XIII Koto Kampar
42	PLTA Koto Panjang	XIII Koto Kampar
43	Batu Bersurat	XIII Koto Kampar
44	Danau Rusa	XIII Koto Kampar
45	Aquari	XIII Koto Kampar
46	Rumah Godang	XIII Koto Kampar
47	Makam Syech Abdul Ghani	XIII Koto Kampar
48	Air Terjun Sungai Osang	XIII Koto Kampar
49	Candi Muara Takus	XIII Koto Kampar
50	Rumah Adat Suku Domo	XIII Koto Kampar
51	Air Terjun Sungai Binamang	XIII Koto Kampar
52	Rimbo Tarantang	XIII Koto Kampar
53	Lubuk Balung	Kampar
54	Puasa Enam	Bangkinang
55	Mesjid Balai	XIII Koto Kampar
56	Muara Mahat	XIII Koto Kampar
57	Ngalau Pasuok	XIII Koto Kampar
58	Trianggulasi I,II, III	XIII Koto Kampar
59	Air Terjun Merangin	Kuok
60	Air Terjun Alahan	XIII Koto Kampar
62	TN Bukit Baling-Rimbang	XIII Koto Kampar
63	SM Tessa Nilo	XIII Koto Kampar
64	Mesjid Batu	XIII Koto Kampar

65	Peti Berindik	XIII Koto Kampar
66	Bangkinang Kuok	Kuok
67	Kawasan Kuala	Kampar
68	Muara Mentawai	Kampar
69	Taman Wisata Kuang	Siak Hulu

4. Potensi pengembangan pertambangan

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa perkebunan, pertanian dan perikanan, sangat perlu dilakukan transformasi ekonomi masyarakat, yang tadinya berbasis lahan sekarang perlu didorong berbasis manusia, artinya dari sektor primer didorong dan difasilitasi untuk beralih ke sektor sekunder atau kegiatan pengolahan. Program pembangunan industri di Kabupaten Kampar meliputi program pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri.

Sedangkan program penunjang antara lain adalah program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyuluhan serta program penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan industri di Kabupaten Kampar sebanyak 565 unit, yang terdiri dari industri logam, mesin, dan kimia sebanyak 40 unit dan industri hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 525 unit.

5. Potensi pengembangan pertambangan

Pengembangan pertambangan di Kabupaten Kampar diarahkan pada jenis pertambangan batuan, batubara, dan mineral logam.

3.4.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Kampar dapat diidentifikasi potensi rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Kampar antara lain:

1. Banjir

Bencana alam yang mulai rutin melanda Kabupaten Kampar dan semakin tahun semakin meluas cakupan bencananya adalah bencana banjir. Banjir yang terjadi pada setiap awal tahun menggenangi lebih dari 8 kecamatan yang berada di sepanjang S.Kampar dan S.Siak. Namun banjir tersebut tidak bersifat permanen, hanya banjir musiman kendati membawa kerugian yang tidak sedikit. Kecamatan yang biasa terkena banjir musiman tersebut adalah Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampa, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu

Selain bencana banjir, Kabupaten Kampar juga sering mengalami bencana longsor, khususnya pada daerah perbatasan dengan Sumatera Barat yang lebih disebabkan karena terdapatnya patahan aktif. Lokasi kawasan longsor yang dimaksud berada di Kecamatan XIII Koto Kampar.

2. Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain:

- Kondisi geologi: batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
- Iklim: curah hujan yang tinggi.
- topografi: lereng yang curam.
- Keadaan tata air: kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
- Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

Gejala umum terjadinya tanah longsor:

- Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing;
- Biasanya terjadi setelah hujan;
- Munculnya mata air baru secara tiba-tiba;
- Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

3. Kebakaran hutan;

Titik-titik kebakaran hutan yang juga dikenal dengan istilah *hot spot* sering terjadi pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi di kecamatan:

- Kampar Kiri Hulu
- Kampar Kiri
- Gunung Sahilan
- Kampar Kiri Hillir, dan
- XIII Koto Kampar

3.4.4 Aspek Tata Ruang

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kampar

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional .

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana sistem pusat pelayanan wilayah dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Wilayah meliputi:

- Hirarki 1 yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi: Kecamatan Bangkinang
- Hirarki 2 yang berfungsi sebagai Pusat Kawasa Lokal (PKL) dan Pusat Kawasan Lokal Promosi (PKLp) meliputi: Kecamatan Patahan dan Kecamatan Lipat Kain
- Hirarki 3 yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Kotagaro (Kecamatan tapung Hilir), Sungai Pagar (Kampar Kiri Hilir), Batu Bersurat (Kecamatan XIII Koto Kampar)
- Hirarki 4 yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi: Gema (Kecamatan kampar Kiri Hulu), Gunung Sahilan (Kecamatan Gunung Sahilan), Pantai Raja (Kecamatan Perhentian Raja), Tambang (Kecamatan Tambang), Kuok, Salo (Kecamatan Salo), Sinama Nenek (Kecamatan Tapung Hulu), Muara Uwai (Kecamatan Bangkinang), Air Tiris (Kampar), Kampar (Kecamatan Kampa), Taratak (Kecamatan rumbio Jaya), Sawah (Kecamatan Kampar Utara).

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Kampar melalui sistem pusat-pusat didukung oleh sistem prasarana wilayah sesuai dengan lokasi dan fungsi masing-masing prasarana. Sistem Prasarana Wilayah yang mendukung pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

b. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Kampar difokuskan pada transportasi darat yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana jalan.

- Jalan Arteri Primer yang menghubungkan simpul-simpul pusat perkotaan sebagai berikut:
 - Batas Sumatera Barat-PPK Batu Bersurat
 - PPK Batu Bersurat-PPL Kuok
 - PPL Kuok-PPL Salo

- PPL Salo-PKW Bangkinang
- PKW Bangkinang-PPL Air Tiris
- PPL Air Tiris-PPL Tambang
- PPL Tambang-Batas Kota Pekanbaru
- Jalan Kolektor Primer 1 adalah segmen jalan yang menghubungkan simpul-simpul:
 - PPL Kuok - batas Kabupaten Rokan Hulu.
 - Batas Kuantan Singingi - Batas Kota Pekanbaru.
- Jalan Kolektor Primer 2 meliputi ruas jalan berikut:
 - Ruas jalan antara PKLp Lipat Kain dengan perbatasan Kabupaten Siak.
 - PKLp Lipat Kain - batas Provinsi Sumatera Barat
- Jalan Kolektor Primer (K3): Jalan lingkaran Bangkinang
- Jalan Lokal Primer adalah segmen jalan yang menghubungkan simpul-simpul:
 - PKLp Patapahan - Batas Kota Pekanbaru
 - PKLp Patapahan - PPL Sinamanenek
 - PPL Sinamanenek-batas Kabupaten Rokan Hulu

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar pusat kegiatan di Kabupaten Kampar maka telah direncanakan dukungan penyediaan infrastruktur transportasi berupa jembatan. Saat ini telah direncanakan lima jembatan yang akan dibangun. Selain itu berdasarkan draf RTRWP Riau di Kabupaten Kampar juga akan dikembangkan/dibangun lima terminal dari tipe A sampai tipe C.

2) Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan sistem energi listrik disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi Listrik bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Sistem energi listrik Kabupaten Kampar merupakan hasil pemaduserasian antara pemanfaatan energi listrik dan pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya alam lainnya (Batubara). Dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan energi listrik diseluruh wilayah Kabupaten Kampar maka perlu dikembangkan inovasi baru yang memanfaatkan sumberdaya energi alternatif yang tidak berbasis fosil, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), tenaga surya, tenaga angin, dan biodisel CPO (sawit).

3) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem Prasarana Telekomunikasi disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat. Arah pengembangan telekomunikasi ditujukan untuk melayani kemudahan hubungan antar wilayah. Sasaran pokoknya adalah meningkatkan pelayanan telekomunikasi pada kota-kota kecamatan yang diperkirakan akan berkembang.

4) Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Rencana sistem jaringan sumberdaya air meliputi sumber daya air dari irigasi, drainase dan air minum. Kabupaten Kampar yang mempunyai 2 Satuan Wilayah Sungai (SWS), 5 Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sejumlah daerah rawa, merupakan suatu potensi untuk pengembangan irigasi. Salah satu tujuan pengembangan sistem irigasi ini adalah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian terutama tanaman pangan lahan basah (padi). Selanjutnya yang dimaksud pengembangan rencana pengelolaan drainase adalah pengelolaan pembuangan air limbah. Kabupaten Kampar memiliki dua sistem yaitu *sistem sanitasi setempat (on-site sanitation)* dan *sistem sanitasi terpisah (off-site sanitation)*. Sistem sanitasi terpisah di wilayah Kabupaten Kampar masih bersatu dengan saluran pembuangan air hujan (*combine sewer system*), dengan jenis saluran terbuka dan tertutup. Pengelolaan air limbah yang direncanakan adalah sistem sanitasi terpisah. Hal ini dilakukan mengingat sistem ini menjamin keamanan terhadap pencemaran lingkungan dan cukup menguntungkan dari segi luas lahan, kesehatan maupun estetika. Secara ideal dalam sistem ini harus dibuat fasilitas pelayanan berupa pipa-pipa tertutup untuk menggantikan fasilitas yang sudah tidak memenuhi syarat. Rencana arahan pengembangan prasarana saluran pembuangan limbah di wilayah Kabupaten Kampar bertujuan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dengan menerapkan sanitasi lingkungan yang sehat dan ekonomis. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Wilayah Kabupaten Kampar dilakukan oleh PDAM Tirta Kampar. Berdasarkan standar pelayanan minimal (Kep.Men. Kimpraswil No. 534/2001), maka kebutuhan air bersih untuk Wilayah

5) Rencana Sistem Jaringan Sampah

Hasil prediksi dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (Kepmenkimpraswil No. 534/2001), maka jumlah timbulan sampah pada akhir tahun perencanaan (2030) adalah sebesar 5.080,01 m³/hari yang terdiri dari timbulan sampah area Non Komersial (NK) sebesar 2.962,01 m³/hari dan area Komersial (K) sebesar 2.118,00 m³/hari. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut maka Rencana Prasarana Persampahan di Wilayah Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada tahun 2030, tingkat pelayanan prasarana persampahan di area Non Komersial adalah 80 persen, (sesuai dengan ketentuan dari Standar Pelayanan Minimal
- Khusus untuk Area Komersial rencana prasarana persampahannya dibuat tersendiri dan dikelola oleh Badan atau lembaga yang mengelola kawasan tersebut.
- Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun rencana ini perlu didukung dengan studi Amdal yang lebih komprehensif. Secara umum, persyaratan lokasi TPA tersebut adalah jenis tanah kedap air, wilayah tidak produktif, tidak mencemarkan sumber air, jarak dari pusat daerah pelayanan ± 10 km, bebas banjir, tidak berlokasi di danau, sungai dan laut serta untuk lokasi TPA > 25 km dari kota perlu dipertimbangkan adanya transfer terpusat. TPA untuk

pemenuhan kebutuhan pengolahan sampah Kabupaten Kampar adalah:

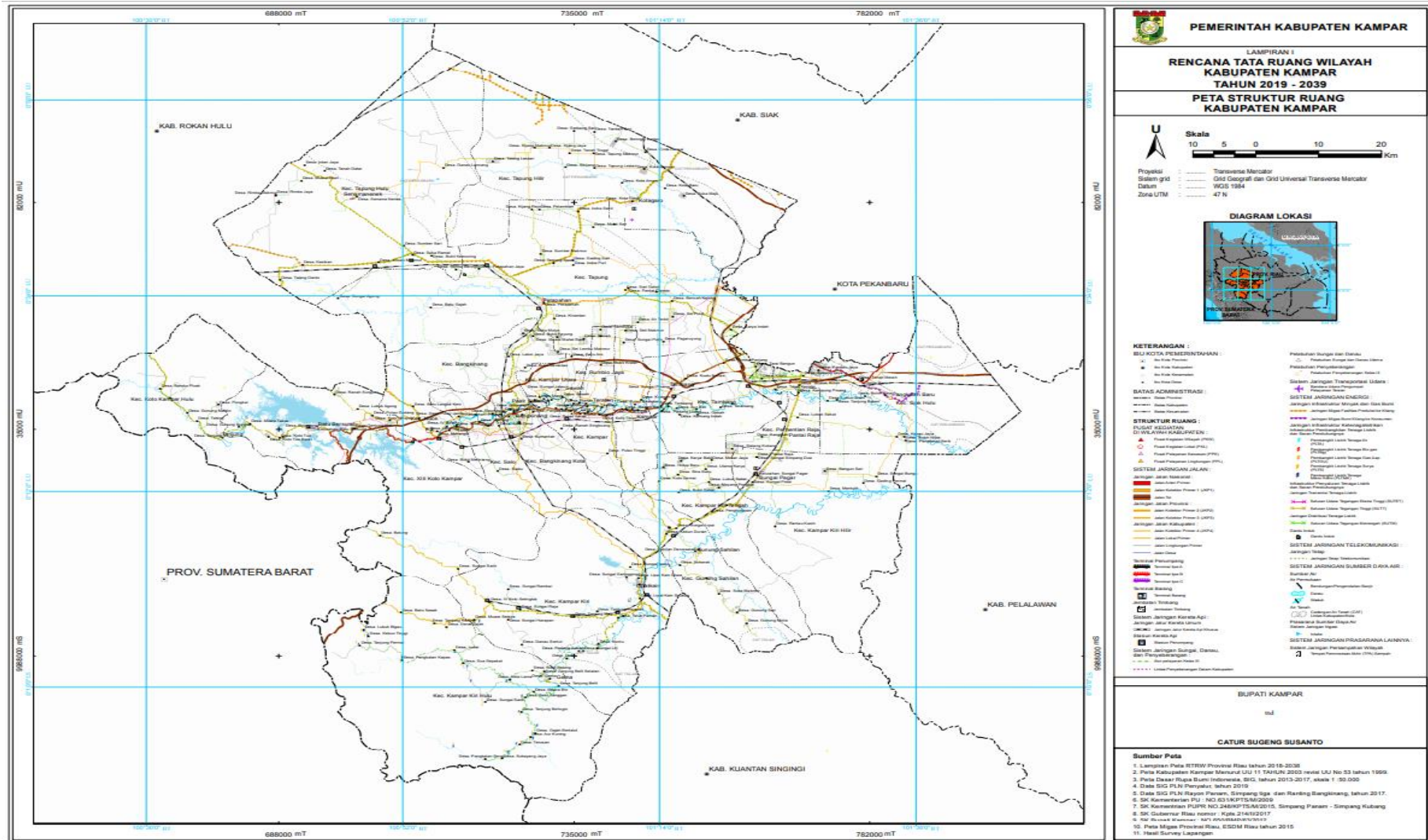
- TPA untuk wilayah utara dikembangkan di Kecamatan Tapung
- TPA untuk wilayah tengah dikembangkan di Kecamatan Salo
- TPA untuk wilayah selatan dikembangkan di Kecamatan Kampar Kiri

2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kampar

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang. Dalam rangka memperoleh kondisi yang lebih seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan lahan dalam jangka waktu rencana tata ruang, maka perencanaan pola ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan kewenangan vertikal menurut dimensi keruangan.

Dalam hal ini, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kampar merupakan upaya untuk memadukan dan menyasrakan kepentingan antar sektor, antar tingkat kewenangan, pertahanan dan keamanan negara, dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan ruang. Pola ruang wilayah Kabupaten Kampar merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Kampar yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Kampar yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

Rencana alokasi pola ruang wilayah Kabupaten Kampar dapat dikelompokkan menjadi dua kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung dan kawasan berfungsi budidaya. Kawasan yang berfungsi lindung meliputi hutan lindung, kawasan dengan kemiringan lereng > 40 persen, kawasan resapan air, sempadan sungai, sempadan Waduk Koto Kampar, suaka margasatwa Bukit Baling-Bukit Rimbang, cagar alam Bukit Bungkok, Taman Hutan Raya, dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.



Gambar .
 Peta Struktur Ruang Kabupaten Kampar

3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis

Guna menunjang pencapaian Misi Kepala Daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

Misi I: Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional

1. Masih terbatasnya kualitas dan akses sarana pelayanan pendidikan
2. Masih terbatasnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
3. Kualitas Sumber Daya Aparaturl yang masih kurang kompeten

Misi II: Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Fasilitas pendukung (khususnya infrastruktur jalan/ irigasi) masih kurang
2. Sentra produksi pertanian dan perikanan yang belum optimal

Misi III: Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional

1. Kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan kurang memadai
2. Kuantitas dan kualitas infrastruktur pemukiman yang belum baik

Misi IV: Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

1. Keberadaan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang belum optimal
2. Prosedur perizinan yang masih sulit
3. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah yang belum maksimal

Misi V: Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju

1. Potensi pariwisata yang belum optimal
2. Masih kurangnya kualitas SDM pelaku wisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi hanya dapat dioperasionalkan jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa **TUJUAN** dan **SASARAN**. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*), yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun atau kurang.

Dalam Rencana Strategis ini disajikan tujuan dan sasaran yang bersifat strategis, yaitu tujuan dan sasaran yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Tahun 2017-2022 sebagaimana diuraikan berikut ini:

Misi Pertama

Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai produktifitas optimal dalam menunjang kelancaran pembangunan

Tujuan 1 :

Mewujudkan penyelenggaraan ketatausahaan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara strategis untuk mendapatkan produktivitas yang optimal.

Sasaran 1 :

Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang tercermin melalui beberapa indikator berikut ini:

- (1) Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
- (2) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- (3) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
- (4) Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
- (5) Tersedianya jaminan barang milik daerah.
- (6) Terlaksananya administrasi keuangan.
- (7) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- (8) Tersedianya jasa kebersihan kantor.
- (9) Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.
- (10) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.
- (11) Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
- (12) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- (13) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- (14) Tersedianya peralatan rumah tangga.
- (15) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- (16) Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor.
- (17) Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman.
- (18) Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang tercermin melalui beberapa indikator berikut ini:

- (1) Terlaksananya pembangunan rumah jabatan/dinas.
- (2) Terlaksananya pembangunan gedung kantor.
- (3) Terlaksananya pengadaan mobil jabatan.
- (4) Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional.
- (5) Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas.
- (6) Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor.
- (7) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendukung kerja.
- (8) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana pendukung kerja.

3) Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:

- (1) Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.
- (2) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja secara tepat waktu dan akuntabel.
- (3) Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun secara tepat waktu dan akuntabel.

Tujuan 2 :

Meningkatkan dan memantapkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran:

Meningkatnya disiplin dan kualitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:

- (1) Tersedianya kartu absensi.
- (2) Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Tersedianya pakaian kerja lapangan.
- (4) Tersedianya pakaian KORPRI.
- (5) Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.
- (6) Meningkatnya SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan formal.
- (7) Meningkatnya SDM aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (8) Meningkatnya SDM aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Tujuan 3 :

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana peralatan kerja lapangan

Sasaran:

Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja lapangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:

- (1) Terlaksananya pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
- (2) Terlaksananya pembangunan gedung work shop
- (3) Terlaksananya pembangunan laboratorium kebinamargaan
- (4) Tersedianya kebutuhan alat-alat berat
- (5) Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
- (6) Tersedianya kebutuhan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
- (7) Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana pendukung kerja lapangan

Tujuan 4:

Mewujudkan penyusunan rencana pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran:

- (1) Terbentuknya dan tersedianya database jalan dan jembatan Kabupaten Kampar
- (2) Tersedianya program penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Kampar yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan prioritas penanganan

Misi Kedua

Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang handal untuk menjangkau daerah terpencil, daerah potensi dan mendukung kawasan cepat tumbuh.

Tujuan:

Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan Kabupaten Kampar yang memenuhi standar kebutuhan dan pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan daerah potensi dan terisolir guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Sasaran:

- 1) Terlaksananya peningkatan dan pembangunan kondisi jalan kabupaten yang mantap dan terbukanya daerah terisolir, yang tercermin melalui beberapa indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya pembangunan jalan
 - (2) Terlaksananya pembangunan jembatan
- 2) Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang mantap melalui pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 3) Terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
- 4) Terciptanya pembangunan infrastruktur pedesaan, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan

- (2) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
- 5) Terciptanya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Misi Ketiga

Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sumber daya air serta normalisasi

sungai guna mengantisipasi bahaya banjir.

Tujuan 1:

Terpeliharanya kelancaran Daerah Aliran Sungai dan Danau guna meminimalisasikan kemungkinan terjadinya banjir

Sasaran:

- 1) Terbentuknya jaringan sungai untuk pengelolaan penyediaan sumber daya air sekaligus mengantisipasi daerah rawan banjir di daerah Kabupaten Kampar, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan reservoir
 - (2) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan pintu air
 - (3) Terlaksananya normalisasi dan rehabilitasi serta pemeliharaan saluran sungai
- 2) Terjaganya lingkungan dari bahaya banjir, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan reservoir pengendali banjir
 - (2) Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
 - (3) Terlaksananya pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
 - (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
 - (5) Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
 - (6) Terlaksananya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai
 - (7) Terlaksananya peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
 - (8) Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong
 - (9) Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

Tujuan 2:

Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola *conjunctive use* bagi kebutuhan rumah tangga, pemukiman, pertanian, dan industri.

Sasaran:

- 1) Tersedianya kebutuhan air baku, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pengambilan saluran pembawa
 - (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
 - (3) Meningkatnya distribusi penyediaan air baku

- 2) Terpeliharanya sungai, danau dan sumber daya air lainnya, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya pembangunan, dan rehabilitasi serta pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya
 - (2) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan kawasan kritis dan kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
 - (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
 - (4) Meningkatnya konservasi air tanah

Misi Keempat

Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan pengairan guna mendukung ketahanan pangan.

Tujuan:

Meningkatnya produksi pertanian melalui ketersediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi

Sasaran:

- 1) Meningkatkan dan berkembangnya jaringan irigasi untuk menunjang pertanian rakyat secara terpadu guna memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat tani. yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi.
 - (2) Terlaksananya pembangunan pintu air.
 - (3) Terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

- 2) Meningkatnya fungsi dan pelayanan jaringan irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pertanian. yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:
 - (1) Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
 - (2) Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.
 - (3) Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan pintu air.
 - (4) Terlaksananya rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, yang meliputi penetapan **Kebijakan** dan **Program** dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan dan Program yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan
			Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Penyelenggaraan Jalan
			Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	Penyelenggaraan Jalan
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Sumber Daya Air
			Persentase penduduk berakses air minum	Cipta Karya
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Cipta Karya
			Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Cipta Karya

			Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Tata Ruang Dan Pertanahan
--	--	--	--	---------------------------

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan di bidang pekerjaan umum dan pengairan.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, lintas OPD, dan lintas kewilayahan. Oleh karena itu mencakup pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, APBD Pemerintah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rincian selengkapnya hal ini sebagaimana tersaji dalam **Lampiran I** dan **II**.

Adapun secara garis besar **program** dan **kegiatan** dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Lokalitas Kewenangan OPD

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - (c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - (d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - (b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- (a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - (e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- (a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (c) Pengadaan Alat Besar
- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (7) Penataan Organisasi
- (a) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- (a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - (b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - (c) Rehabilitasi Bendungan Irigasi
 - (d) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - (e) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 - (f) Pengelolaan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- (1) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
 - (b) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - (c) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - (d) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - (e) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - (f) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - (g) Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - (h) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - (b) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelohan Setempat
 - (c) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Permukiman
- (2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Pengadaan pakaian kerja lapangan.
- (4) Pengadaan pakaian KORPRI.
- (5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - (b) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - (c) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

6) Program Penataan Bangunan Gedung

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - (a) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG
 - (b) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - (c) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - (d) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

7) Program Penyelenggaraan Jalan

- (1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - (a) Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - (b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan
 - (c) Pembangunan Jalan
 - (d) Rekonstruksi Jalan
 - (e) Pemeliharaan Rutin Jalan
 - (f) Pembangunan Jembatan
 - (g) Rehabilitasi Jembatan
 - (h) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - (i) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- (1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - (a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - (b) Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - (c) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

9) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- (1) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

10) Program Pengelolaan Tanah Kosong

- (1) Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - (a) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

11) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

- (1) Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - (a) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

1	0	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	100 Persen	60.000.000	100 Persen	1 Kegiatan	100 Persen	72.000.000	100 Persen	1 Kegiatan	100 Persen	86.400.000	100 Persen	1 Kegiatan	100 Persen	103.680.000
			2		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.698.000.000				2.037.600.000				2.445.120.000				2.934.144.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	18.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	21.600.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	25.920.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	31.104.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	600.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	720.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	864.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	1.036.800.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Kebutuhan Logistik	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	120.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	144.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	172.800.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	207.360.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tertaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Pakai habis	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	84.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	100.800.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	120.960.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	145.152.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Bahan Bacaan Perundang-undangan	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	36.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	43.200.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	51.840.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	62.208.000
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhiya Kebutuhan Rapat dan Koordinasi	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	840.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	1.008.000.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	1.209.600.000	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	1.451.520.000
			2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.440.000.000				1.728.000.000				2.073.600.000				2.488.320.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	Tertaksananya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	600.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	720.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	864.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	1.036.800.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	Tertaksananya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	600.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	720.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	864.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	1.036.800.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Alat Besar	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Alat Berat yang diadakan	Tertaksananya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	240.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	288.000.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	345.600.000	100 Persen	2 Unit	1 Tahun	414.720.000
			2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.560.000.000				1.872.000.000				2.246.400.000				2.695.680.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhiya Kebutuhan Air, Listrik dan Akses Internet	Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	300.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	360.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	432.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	518.400.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

1	0	3	0	1	2.	0	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	60.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	72.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	86.400.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	103.680.000			
1	0	3	0	1	2.	0	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.440.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.728.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	2.073.600.000			
					2				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.560.000.000											2.695.680.000	
1	0	3	0	1	2.	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	Terpeliharanya Fasilitas penunjang kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	216.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	259.200.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	311.040.000			
1	0	3	0	1	2.	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	Terpeliharanya Fasilitas penunjang kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	420.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	504.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	604.800.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	725.760.000			
1	0	3	0	1	2.	0	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpeliharanya Peralatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Fasilitas penunjang kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	960.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.152.000.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.382.400.000	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1.658.880.000			
					2				Penataan Organisasi											72.000.000												124.416.000
1	0	3	0	1	2.	0	0	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan SAKIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	2 Dokumen	72.000.000	100 Persen	1 Tahun	2 Dokumen	86.400.000	100 Persen	1 Tahun	2 Dokumen	103.680.000	100 Persen	1 Tahun	2 Dokumen	124.416.000			
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											2.855.748.452												4.934.733.326
					2				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											2.855.748.452												4.934.733.326
1	0	3	0	2	2.	0	0	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Dokumen	52,74 Persen	395.840.275	70 persen	2 Dokumen	52,74 Persen	475.008.330	70 persen	2 Dokumen	52,74 Persen	570.009.996	70 persen	2 Dokumen	52,74 Persen	684.011.996			
1	0	3	0	2	2.	0	1	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	Tolok Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Yang direhabilitasi	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	9 Kegiatan	52,74 Persen	299.908.177	70 persen	9 Kegiatan	52,74 Persen	359.889.813	70 persen	9 Kegiatan	52,74 Persen	431.867.775	70 persen	9 Kegiatan	52,74 Persen	518.241.330			
1	0	3	0	2	2.	0	1	5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	13 Daerah Irigasi	52,74 Persen	600.000.000	70 persen	13 Daerah Irigasi	52,74 Persen	720.000.000	70 persen	13 Daerah Irigasi	52,74 Persen	864.000.000	70 persen	13 Daerah Irigasi	52,74 Persen	1.036.800.000			
1	0	3	0	2	2.	0	2	1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	Tolok Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Yang dipelihara	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	12 Kegiatan	52,74 Persen	960.000.000	70 persen	12 Kegiatan	52,74 Persen	1.152.000.000	70 persen	12 Kegiatan	52,74 Persen	1.382.400.000	70 persen	12 Kegiatan	52,74 Persen	1.658.880.000			

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

1	0	0	2	2	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	Jumlah Jaringan Irigasi yang dipelihara	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	4 Kegiatan	52.74 Persen	300.000.000	70 persen	4 Kegiatan	52.74 Persen	360.000.000	70 persen	4 Kegiatan	52.74 Persen	432.000.000	70 persen	4 Kegiatan	52.74 Persen	518.400.000
1	0	0	2	2	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	Tertaksananya Monitoring Alokasi Air Irigasi	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	1 Kegiatan	52.74 Persen	300.000.000	70 persen	1 Kegiatan	52.74 Persen	360.000.000	70 persen	1 Kegiatan	52.74 Persen	432.000.000	70 persen	1 Kegiatan	52.74 Persen	518.400.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													1.980.000.000			2.376.000.000			2.851.200.000			3.421.440.000			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													1.980.000.000			2.376.000.000			2.851.200.000			3.421.440.000			
1	0	0	2	0	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Tertaksananya Supervisi SPAM	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	300.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	360.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	432.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	518.400.000
1	0	0	2	0	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Pembangunan/Pengembangan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
1	0	0	2	0	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Pembangunan/Pengembangan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
1	0	0	2	0	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Peningkatan Jangkauan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
1	0	0	2	0	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Perluasan Jangkauan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
1	0	0	2	0	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Perluasan Jangkauan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
1	0	0	2	1	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Peningkatan Jangkauan Jaringan bukan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
1	0	0	2	1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	85 persen	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													1.086.483.238			1.303.779.885			1.564.535.862			1.877.443.035			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													1.086.483.238			1.303.779.885			1.564.535.862			1.877.443.035			

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

1	035	0202	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perbukitan Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	Terlaksananya Supervisi Pengelolaan Air Limbah	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	426.483.238	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	511.779.885	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	614.135.862	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	736.963.035
1	035	020106	Pembangunan/Penyediaan Sub. Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perbukitan Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	Tersedianya Sistem Pengolahan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	2 Kegiatan	300.000.000	100 Persen	1 Kegiatan	2 Kegiatan	360.000.000	100 Persen	1 Kegiatan	2 Kegiatan	432.000.000	100 Persen	1 Kegiatan	2 Kegiatan	518.400.000
1	035	020102	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perbukitan Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kegiatan	2 Kegiatan	360.000.000	100 Persen	5 Kegiatan	2 Kegiatan	432.000.000	100 Persen	5 Kegiatan	2 Kegiatan	518.400.000	100 Persen	5 Kegiatan	2 Kegiatan	622.080.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											794.933.028				953.919.634				1.144.703.560				1.373.644.272
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											794.933.028				953.919.634				1.144.703.560				1.373.644.272
1	036	020101	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase	Sistem jaringan drainase perkotaan berfungsi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	65 Persen	80 Persen	240.000.000	1 Tahun	65 Persen	80 Persen	288.000.000	1 Tahun	65 Persen	80 Persen	345.600.000	1 Tahun	65 Persen	80 Persen	414.720.000
1	036	020105	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	Jumlah Saluran Drainase dibangun	Sistem jaringan drainase perkotaan berfungsi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	18 Unit	80 Persen	314.933.028	1 Tahun	18 Unit	80 Persen	377.919.634	1 Tahun	18 Unit	80 Persen	453.503.560	1 Tahun	18 Unit	80 Persen	544.204.272
1	036	020109	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	Terpeliharanya Saluran Drainase	Sistem jaringan drainase perkotaan berfungsi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	2 Kegiatan	80 Persen	240.000.000	1 Tahun	2 Kegiatan	80 Persen	288.000.000	1 Tahun	2 Kegiatan	80 Persen	345.600.000	1 Tahun	2 Kegiatan	80 Persen	414.720.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											26.438.975.634				31.726.770.761				38.072.124.913				45.686.549.896
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											26.438.975.634				31.726.770.761				38.072.124.913				45.686.549.896
1	038	020101	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	Jumlah Dokumen IMB yang diterbitkan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	50 Dokumen	100 Persen	638.975.634	90 Persen	50 Dokumen	100 Persen	766.770.761	90 Persen	50 Dokumen	100 Persen	920.124.913	90 Persen	50 Dokumen	100 Persen	1.104.149.896

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

1	0308202	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	Persentase Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	65 Persen	100 Persen	6.000.000.000	90 Persen	65 Persen	100 Persen	7.200.000.000	90 Persen	65 Persen	100 Persen	8.640.000.000	90 Persen	65 Persen	100 Persen	10.368.000.000		
1	0308201	Rehabilitasi, Renovasi dan Uchabusi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	Renovasi Gedung Milik Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	3 Unit	100 Persen	19.200.000.000	90 Persen	3 Unit	100 Persen	23.040.000.000	90 Persen	3 Unit	100 Persen	27.648.000.000	90 Persen	3 Unit	100 Persen	33.177.600.000		
1	0308201	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	6 Unit	100 Persen	600.000.000	90 Persen	6 Unit	100 Persen	720.000.000	90 Persen	6 Unit	100 Persen	864.000.000	90 Persen	6 Unit	100 Persen	1.036.800.000		
	03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										-												
1	03011201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										-												
1	03011204	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan dan Jenis nya	Jumlah Peserta dan jenis Pelatihan terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	150	100%	164.100.000	100%	150	100%	196.920.000	100%	150	100%	236.304.000	100%	150	100%	283.564.800		
1	03011205	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	MoU Pengembangan Kerjasama dan Vendor/Pabrikasi Material	Jumlah Vendor/Pabrikasi yang bekerjasama dalam pembinaan Jasa Konstruksi	Dukungan teknologi, Material, instruktur dan Metode Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6	100%	311.040.000	100%	6	100%	373.248.000	100%	6	100%	447.897.600	100%	6	100%	537.477.120		
1	03011206	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Peserta Pelatihan lulus Uji sertifikasi	Jumlah Peserta yang lulus Pelatihan	Jumlah Sertifikat Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	150	100%	132.000.000	100%	150	100%	158.400.000	100%	150	100%	190.080.000	100%	150	100%	228.096.000		
	03011202	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.										-												
1	03011202	Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Elektronik Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Perangkat Elektronik Tersedia	Tersedianya LCD Display SIPJAKI dan Desktop Komputer Lengkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3	100%	60.000.000	100%	3	100%	72.000.000	100%	3	100%	86.400.000	100%	3	100%	103.680.000		
1	03011203	Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI.	Tersedianya Tenaga Operator SIPJAKI terlatih	Jumlah Tenaga Terlatih	Operator Terlatih bersertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2	100%	60.000.000	100%	2	100%	72.000.000	100%	2	100%	86.400.000	100%	2	100%	103.680.000		
1	03011206	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha.	Tersedianya Data Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil	Laporan Data per K/L/OPD Penyelenggaraan Konstruksi	Jumlah Dan Sebaran Data Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3	100%	240.000.000	100%	3	100%	288.000.000	100%	3	100%	345.600.000	100%	3	100%	414.720.000		

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

1	0	3	1	0	2.	2	01	2	2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Dokumen Monev Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	1 Dokumen	77.18 Persen	240.000.000	80 persen	1 Dokumen	77.18 Persen	288.000.000	80 persen	1 Dokumen	77.18 Persen	345.600.000	80 persen	1 Dokumen	77.18 Persen	414.720.000				
1	0	3	1	0	2.	2	01	2	3	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Tertaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	10 Dokumen	77.18 Persen	1.200.000.000	80 persen	10 Dokumen	77.18 Persen	1.440.000.000	80 persen	10 Dokumen	77.18 Persen	1.728.000.000	80 persen	10 Dokumen	77.18 Persen	2.073.600.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	3.540.000.000				4.248.000.000				5.097.600.000				6.117.120.000				
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	2.640.000.000				3.168.000.000				3.801.600.000				4.561.920.000				
1	0	3	1	2	2.	0	01	2	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Tersedianya Rancangan Dokumen RDTR di Kabupaten Kampar sebagai acuan untuk pemanfaatan Ruang	Terselenggaran dan terkoordinasi Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	4 Dokumen	1 Tahun	1.200.000.000	1 tahun	4 Dokumen	1 Tahun	1.440.000.000	1 tahun	4 Dokumen	1 Tahun	1.728.000.000	1 tahun	4 Dokumen	1 Tahun	2.073.600.000			
1	0	3	1	2	2.	0	01	3	0	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Terkoordinasinya Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang di Kabupaten Kampar melalui TIM TKPRD Kabupaten Kampar	Terselenggaran dan terkoordinasi Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Kegiatan	1 Tahun	1.200.000.000	1 tahun	1 Kegiatan	1 Tahun	1.440.000.000	1 tahun	1 Kegiatan	1 Tahun	1.728.000.000	1 tahun	1 Kegiatan	1 Tahun	2.073.600.000			
1	0	3	1	2	2.	0	01	4	0	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penundangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Terselenggaranya sosialisasi dan terlatihnya Aparat Bidang Tata Ruang dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terselenggaran dan terkoordinasi Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	240.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	288.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	345.600.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	414.720.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	240.000.000				288.000.000				345.600.000				414.720.000				
1	0	3	1	2	2.	0	02	0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Tersedianya Dokumen Pendataan Lokasi Ruang dan rencana kegiatan Strategis Cepat Tumbuh	Sinkronisasi Data Tata Ruang dan Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	240.000.000	1 tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	288.000.000	1 tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	345.600.000	1 tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	414.720.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	420.000.000				504.000.000				604.800.000				725.760.000				
1	0	3	1	2	2.	0	03	0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Tersedianya data bangunan gedung milik pemerintah dan rencana kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar	Terdatanya Kegiatan Pembangunan dan wilayah Kabupaten Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000	1 tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	504.000.000	1 tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	604.800.000	1 tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	725.760.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	240.000.000				288.000.000				345.600.000				414.720.000				
1	0	3	1	2	2.	0	04	0	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							240.000.000				288.000.000				345.600.000				414.720.000				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																															
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																															
2 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																															
2	1	0	0	2	0	01	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertindaknya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian	Ganti Kerugian tanah masyarakat terselenggara dengan baik	Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	1.200.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	1.440.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	1.728.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	2.073.600.000		
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																															
2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																															
2	1	0	0	2	0	08	2	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tertindaknya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar	Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Kampar	Tanah Milik pemerintah Kabupaten teridentifikasi dan terdata dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	2 Dokumen	1 Tahun	420.000.000	1 tahun	2 Dokumen	1 Tahun	504.000.000	1 tahun	2 Dokumen	1 Tahun	604.800.000	1 tahun	2 Dokumen	1 Tahun			
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH																															
2 Penerbitan Izin Membuka Tanah																															
2	1	0	0	2	0	09	1	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara	Terdapat dan Terfasilitasi Penyelesaian Tanah Masyarakat dan fasilitas umum yang berada di dalam kawasan hutan	Terkordinasinya penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	300.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	360.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun	432.000.000	1 tahun	2 Kegiatan	1 Tahun			
TOTAL																	126.783.253.900				152.139.904.680				182.567.885.615						

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan 2021 merupakan data dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan; dan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Evaluasi terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dijelaskan Sebagai Berikut :

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, menyelenggarakan urusan Infrastruktur dengan program sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikatornya Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, target 100 persen, realisasi 100 persen;
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikatornya Terpenuhinya Anggaran Gaji dan Laporan Realisasi Kegiatan, target 100 persen, realisasi 100 persen;
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikatornya Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah, target 0 persen, realisasi 0 persen;
- D. Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikatornya Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah, target 100 persen, realisasi 100 persen;
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikatornya Terpenuhinya Jasa Penunjang, target 100 persen, realisasi 100 persen;
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikatornya Terpeliharanya Fasilitas Penunjang Kinerja target 100 persen, realisasi 100 persen;
- G. Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikatornya Terpeliharanya kinerja Aparatur yang baik, target 100 persen, realisasi 100 persen;

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikatornya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik, target 100 persen, realisasi 100 persen;

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikatornya Meningkatnya Presentase Rumah Tanggaa Berakses Air Bersih, target 100 persen, realisasi 100 persen;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam dengan indikatornya Sistem Jaringan Drainase Perkotaan Berfungsi Baik, target 100 persen, realisasi 100 persen;

Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan indikatornya Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung, target 100 persen, realisasi 99,17 persen

Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikatornya Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan, target 100 persen, realisasi 97,22 persen

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan indikatornya Terselenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar, target 100 persen, realisasi 100 persen;

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikatornya Terdatanya kegiatan pembangunan dan wilayah kabupaten Kampar, target 100 persen, realisasi 100 persen;

KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN	NILAI KEGIATAN	REALISASI		KET
	DALAM DPA	(Rp)	(%)	
	(Rp)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.995.320,00	54.995.320	100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59.732.250,00	53.517.870	90	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.296.124,00	3.713.324	45	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.834.040,00	27.834.040	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.334.824.796,00	10.112.428.400,00	97,85	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.862.350,00	12.361.850	27	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.250.000,00	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107.195.000,00	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.545.585,00	13.545.585	100	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

Peralatan dan Perlengkapan Kantor	524.281.953,00	316.880.300	60	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.690.600,00	81.639.919	100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.636.209,00	63.636.209	100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.720.000,00	22.440.000	81	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623.066.000,00	540.642.883	87	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.218.000,00	197.765.000	80	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.650.000,00	26.650.000	87	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	914.372.749,00	861.292.749	94,19	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.924.926,00	103.468.737	80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.293.000,00	309.141.731	96	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	735.000.000,00	730.719.000	99	
Penataan Organisasi				
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46.300.000,00	46.300.000	100	

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA						
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	329.866.896,00	310.869.896	95		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.127.175.481,00	3.865.319.316	95		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.358.420.709,00	1.270.750.709	94		
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	199.537.157,00	135.919.657	68		
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.364.062.799,00	3.621.744.599	92		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	567.017.610,00	522.576.110	92		
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.748.721.495,00	5.029.264.158	90		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	852.429.695,00	410.319.695	48	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16.804.318.202,00	13.014.393.083	80	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.037.423.926,00	945.874.626	92	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.469.450.872,00	136.651.872	9	
Pembangunan Jalan	83.046.949.567,00	77.799.675.237	98	
Pemeliharaan Rutin Jalan	4.181.451.067,00	2.759.455.670	66	
Pembangunan Jembatan	13.212.931.152,00	10.482.924.685	88	
Rehabilitasi Jembatan	1.391.461.186,00	1.012.942.786	81	
Rekonstruksi Jalan	17.246.424.000,00	15.819.877.600	99	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.525.659.774,00	1.205.352.954	79	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	244.321.024,00	205.333.524	84
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	109.602.645,00	104.502.645	95
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.709.250.442,00	190.054.060	11
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	252.916.125,00	246.276.125	97
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
Penerbitan Izin Membuka Tanah			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	288.293.125,00	227.227.325	79
TOTAL	175.475.373.851,00	152.896.279.249,63	78,08

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar yang kami susun. Selanjutnya untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen lainnya, yaitu seperti :

1. Dokumen Rencana Kerja setiap tahun yaitu untuk tahun 2023 sampai dengan 2026.
2. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD).

Disamping berguna untuk penyusunan dokumen tersebut diatas, Rencana Strategis juga berguna untuk bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Kami mengharapkan Rencana Strategis ini kiranya dapat terlaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dengan baik, dapat melayani masyarakat dengan memuaskan serta dipertanggung jawabkan.

Bangkinang Kota, Januari 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KAMPAR



AFDAL ST., MT
NIP. 1970035 199903 1 004